

(p-ISSN: 1979-4894; e-ISSN: 2620-326X)

Al-Munzir Journal 18 (1), 1-26

Submitted: 18th December 2025, Revised: 5th June 2025, Accepted: 8th June 2025

Published: 10th June 2025

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International License.

Strategies for Providing Base Transceiver Stations in Remote Areas to Support Community Access to Information with a Collaborative Governance Approach in Bombana Regency

Mahdar¹, Paramitha Purwitasari², Muh. Akram Raihan³

¹Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara, Indonesia. E-mail: mahdar.unusra@gmail.com

²Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara, Indonesia. E-mail: paramitha.purwita@gmail.com

³Universitas Nahdlatul Ulama Sulawesi Tenggara, Indonesia. E-mail: muhakramraihan31@gmail.com

Abstract

Basic infrastructure needed by the community is the government's obligation. One of these basic infrastructures is telecommunications network access. Base Transceiver Station (BTS) is a telecommunications infrastructure that has an important role in improving communication access in remote communities. This study attempts to analyze strategies in providing Base Transceiver Stations in Supporting Community Information Access with a Collaborative Governance Approach in Bombana Regency. The approach taken is a qualitative approach, where this research has been conducted in Bombana Regency and in Kendari City during October-November 2024. The results of the study found several strategies that need to be considered in providing Base Transceiver Stations (BTS) in supporting community information access with a Collaborative Governance approach in Bombana Regency consisting of optimizing Regulations to support BTS Development in several areas of Bombana Regency, utilizing the latest technology in BTS Development, increasing socialization and community education, integrating aspects of security and environmental protection in BTS development, prioritizing BTS development in blank spot areas, infrastructure development that accommodates geographic terrain, community-based approaches and collaboration to reduce social resistance and optimizing infrastructure in increasing access and reducing geographical constraints. The recommendations suggested by this research are to encourage the optimization of regulations in supporting BTS development in Bombana Regency and to encourage the use of the latest technology in BTS development.

Keywords: Base Transceiver Station, Collaborative Governance, Infrastructure, Internet.

1. Pendahuluan

Pembangunan sebagai suatu proses yang melibatkan perubahan, tidak terjadi secara kebetulan atau acak. Sebaliknya, perubahan tersebut dilakukan dengan perencanaan yang matang dan kesadaran untuk mencapai tujuan tertentu. Pembangunan bukanlah hal yang bersifat spontan, melainkan hasil dari usaha yang terstruktur dan terarah (Riyadi &

Bratakusumah, 2005). Pembangunan sendiri sebagai suatu proses multidimensional haruslah mencerminkan terjadinya perubahan secara total suatu masyarakat atau suatu sistem sosial secara keseluruhan untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang lebih baik (B. Yusuf & Ridwan, 2018). Keberhasilan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah sangat didukung dengan terpenuhinya infrastruktur. Infrastruktur juga berpengaruh terhadap peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia baik itu infrastruktur jalan, listrik, air bersih dan jaringan telekomunikasi. Basri (2002) menyatakan bahwa tersedianya infrastruktur dapat merangsang dan mendorong proses pembangunan di suatu daerah.

Kuznets (Amsyal, 2024) menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur merupakan *public service obligation*, yaitu sesuatu yang seharusnya menjadi kewajiban pemerintah karena infrastruktur merupakan prasarana publik paling primer dalam mendukung kegiatan ekonomi suatu negara. Ketersediaan infrastruktur juga sangat menentukan tingkat efisiensi dan efektivitas kegiatan ekonomi serta merupakan syarat agar perekonomian berjalan dengan baik.

Salah satu tujuan pemerintah untuk periode 2020-2024 adalah fokus pada penyediaan infrastruktur, termasuk Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), guna memastikan pemerataan akses dan konektivitas *broadband* di seluruh Indonesia. Tujuh agenda pembangunan yang tercantum dalam RPJMN 2020-2024 menjadi acuan utama dalam strategi nasional, yang memberikan mandat kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo (kini: Kementerian Komunikasi Digital atau Komdigi) Republik Indonesia. Mandat ini mencakup agenda kelima yang bertujuan untuk memperkuat infrastruktur guna mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, serta agenda ketujuh yang fokus pada penguatan stabilitas politik, hukum, pertahanan dan keamanan, serta transformasi pelayanan publik (Dhahir, 2019).

Pembangunan sarana jaringan telekomunikasi dan informasi di daerah perbatasan berupa bangunan tower mini yaitu *Base Transceiver Station (BTS)*. BTS adalah sebuah infrastruktur telekomunikasi yang memfasilitasi komunikasi nirkabel antara perangkat komunikasi dan jaringan operator. BTS memiliki peran penting dalam peningkatan akses komunikasi pada masyarakat terpencil. Dengan adanya BTS, wilayah yang sebelumnya terisolasi dari jaringan telekomunikasi dapat terhubung dengan dunia luar. BTS berfungsi sebagai pemancar sinyal yang menghubungkan perangkat komunikasi seperti ponsel dengan jaringan seluler, sehingga memungkinkan masyarakat untuk melakukan komunikasi suara, pesan teks, serta akses internet (Lee, 2018). Peningkatan akses komunikasi ini sangat vital,

karena memungkinkan masyarakat terpencil untuk mengakses informasi yang dapat menunjang kehidupan mereka seperti layanan kesehatan, pendidikan, dan informasi ekonomi. Selain itu, BTS juga memfasilitasi konektivitas yang lebih baik antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat, mempercepat distribusi informasi dan layanan publik. Dengan demikian, BTS tidak hanya meningkatkan komunikasi tetapi juga mendorong pertumbuhan sosial dan ekonomi di wilayah terpencil (Sugeng, 2020).

Kementerian Kominfo RI memiliki target dalam penyiapan *Base Transceiver Station* (BTS) dengan program BTS 4G. Target pembangunan BTS sebanyak 9.113 desa 3T hingga tahun 2022. Namun agenda tersebut belum sepenuhnya terealisasi sehingga masih banyak daerah mengalami keterbatasan akses terhadap informasi. Penyebabnya adalah luas wilayah dan kondisi geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan dengan penyebaran penduduk cenderung kurang merata dan berimplikasi pada penyediaan sarana telekomunikasi dan informasi.

Kabupaten Bombana merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara. Kabupaten Bombana terdiri atas 22 kecamatan dengan luas wilayah sebesar 3.316.36 km². Potensi Kabupaten Bombana yang didominasi oleh bidang pertanian dan peternakan belum dikembangkan dengan baik. Padahal pengembangan tersebut diyakini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi. Diharapkan dengan adanya ketersediaan BTS dapat mendorong pembukaan akses informasi masyarakat yang bisa berimplikasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Namun observasi awal yang dilakukan oleh peneliti menemukan masih banyaknya wilayah di Kabupaten Bombana yang masih tergolong *blankspot* dan sulit untuk diakses dalam jaringan TIK.

Ketersediaan BTS pada daerah yang sebelumnya sulit terjangkau oleh jaringan internet akan membuat masyarakat mendapatkan akses informasi dan keterhubungan yang lebih luas, termasuk akses informasi pendidikan, kesehatan, pertanian, dan berbagai sektor kehidupan lainnya. Selain itu sangat diyakini dengan hadirnya BTS sebagai pemicu layanan internet akan membuka peluang sektor usaha lainnya berbasis digital seperti peningkatan transaksi digital dan pemasaran produk-produk masyarakat di Kabupaten Bombana dengan *platform* digital dan *online*.

Tersedianya akses telekomunikasi dan informasi, diharapkan dapat mengatasi masalah keterisolasian suatu daerah atau wilayah. Akses ini memungkinkan terjalinnya komunikasi yang lebih lancar dan konektivitas yang lebih baik antara wilayah yang sebelumnya sulit dijangkau, baik dari sisi ekonomi, sosial, maupun budaya. Infrastruktur telekomunikasi yang

memadai dapat mempercepat aliran informasi, meningkatkan peluang bisnis, serta memperluas jangkauan pendidikan dan layanan kesehatan (Utomo, 2019). Dengan demikian, keterisolasian yang sebelumnya menjadi penghalang bagi perkembangan wilayah dapat teratasi, membuka akses yang lebih luas untuk kemajuan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah tersebut.

Sinaga (2021) menyatakan bahwa penyelenggaraan pemerintahan hari ini tidak bisa lagi bekerja secara parsial dan tidak melibatkan dukungan dan kerja sama berbagai pihak sehingga membutuhkan suatu kerja sama dengan berbagai pihak atau *stakeholder* (pemangku kepentingan) sehingga tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Wanna (Yasintha, 2020) mengemukakan bahwa studi kolaborasi antarberbagai *stakeholder* yang akhirnya dikenal dengan istilah *collaborative governance* menyiratkan bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya didorong untuk melibatkan berbagai *stakeholder* lainnya dan bahkan warga masyarakat sehingga rancangan kebijakan benar-benar efektif dan efisien serta memenuhi kebutuhan yang diinginkan. *Collaborative governance* adalah strategi baru dalam suatu sistem tata kelola pemerintahan yang membuat beragam *stakeholder* berkumpul dalam forum yang sama membuat konsensus bersama (Ansell & Gash, 2007).

Penerapan metode *collaborative governance* saat ini sudah mendesak untuk dilaksanakan terutama dalam pelaksanaan suatu kebijakan publik mengingat keterbatasan anggaran dan Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga tujuan bersama dari kebijakan yang dimaksud dapat terealisasi (Satyadharma & Susanti, 2024). Banyak alasan untuk diterapkannya *Collaborative Governance* seperti peningkatan efisiensi dalam pengambilan keputusan serta penyelesaian masalah-masalah kompleks yang terkadang tidak bisa diselesaikan satu instansi pemerintah saja (Satyadharma & Susanti, 2024).

Penelitian relevan yang mempergunakan strategi bidang pengembangan telekomunikasi dan informasi sudah dilaksanakan oleh Munawaroh (2018) yang menyatakan perlunya dilakukan beberapa identifikasi permasalahan yang ada, lalu dianalisis dengan strategi yang tepat dalam mengembangkan infrastruktur telekomunikasi dan informasi. Penelitian yang dilakukan oleh Munawaroh (2018) menemukan beberapa strategi yang perlu dilakukan oleh Dinas Kominfo (Diskominfo) Kabupaten Inhu dalam pelaksanaan program Pengaduan Online Lapor.

Penelitian relevan yang membahas mengenai dampak dari kehadiran BTS terhadap daerah dan mendorong terbukanya akses informasi kepada masyarakat telah diteliti oleh Juanda & Izzulhaq (2023) dan Subiakto (2013). Penelitian yang dilakukan oleh Juanda &

Izzulhaq (2023) menyimpulkan beberapa strategi yang harus dilakukan oleh Dinas Kominfo Parigi Moutong dalam melakukan pemerataan jaringan internet di Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Subiakto (2013) mengkaji dan menganalisis manfaat dari internet masyarakat yang difokuskan pada Kabupaten Lumajang dan Banyuwangi Provinsi Jawa Timur.

Penelitian ini menawarkan pendekatan yang berbeda dibandingkan beberapa studi sebelumnya dengan mengusulkan strategi penyediaan *Base Transceiver Station* (BTS) melalui perspektif *collaborative governance*. Pendekatan ini menjadi kebaruan karena melibatkan berbagai pemangku kepentingan—pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat—dalam proses pengambilan keputusan serta implementasi kebijakan penyediaan infrastruktur telekomunikasi. Dengan kolaborasi yang kuat, diharapkan hambatan birokrasi, pembiayaan, dan distribusi infrastruktur dapat diatasi secara lebih efektif.

Pendekatan ini juga relevan dalam konteks pemerataan akses informasi di daerah tertinggal dan terpencil. Oleh karena itu penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi konseptual dan praktis dalam memperkuat kebijakan digital yang inklusif dan partisipatif.

2. Metode Penelitian

Pendekatan yang dilakukan adalah dengan pendekatan kualitatif. Alasan utama pendekatan ini dipilih karena penelitian ini berusaha untuk mengetahui, menggambarkan, dan menganalisis kenyataan dari kejadian yang diteliti. Dengan metode ini, peneliti dapat mengumpulkan data berupa wawancara, observasi, atau dokumentasi yang kemudian dianalisis secara induktif untuk menghasilkan pemahaman secara komprehensif. Keunggulan utama pendekatan kualitatif adalah kemampuannya untuk menggambarkan dan menjelaskan fenomena secara rinci, serta memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai dinamika sosial, budaya, atau perilaku manusia yang tidak dapat diukur dengan angka atau statistik. Adapun analisis data dilakukan dengan metode SWOT (*Strength, Weakness, Opportunities, and Threats*) sehingga mendapat gambaran terkait prioritas yang harus dilakukan oleh *stakeholder*. Adapun informan dalam penelitian ini akan terlihat pada Tabel 1.

Selain itu hasil akhir dari rekomendasi ini adalah strategi dalam penyediaan Menara BTS dalam menunjang akses informasi masyarakat dengan pendekatan *collaborative governance* yang diharapkan mampu mendorong peningkatan akses informasi teknologi pada masyarakat Kabupaten Bombana.

Tabel 1 Informan Penelitian

No	Nama Informan	Jabatan
1	Dr. M. Ridwan Badallah, S.Pd., MM.	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara
2	Juniati Azizah	Pranata Komputer Ahli Bidang Teknologi Informatika dan Komunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sulawesi Tenggara
3	Rusdiamin	Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bombana
4	Rismawati Fattah	Kasubag Perencanaan dan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bombana
5	Muhammad Rapi	Kepala Desa Pokurumba, Kecamatan Poleang
6	Adnan Haris	Sekretaris Desa Pokurumba Kecamatan Poleang
7	Jusman	Kepala Desa Paria Kec. Poleang Tengah Kabupaten Bombana
8	Rasyid Tinri	Tokoh masyarakat Desa Paria Kec. Poleang Tengah Kabupaten Bombana
9	Alfian	Tokoh Pemuda Desa Lampata Kec. Rumbia Tengah

Sumber: Data Primer (2024)

3. Hasil dan Pembahasan

Gambaran *Base Transceiver Station* (BTS) di Kabupaten Bombana

Hasil wawancara dengan informan penelitian terutama dari Dinas Kominfo Kabupaten Bombana dan Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tenggara menyatakan bahwa di Kabupaten Bombana, Provinsi Sulawesi Tenggara terdapat 55 menara *Base Transceiver Station* (BTS) yang telah dibangun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) sampai dengan Tahun 2024. Ke-55 BTS tersebut tersebar di wilayah-wilayah terpencil yang meliputi 20 kecamatan dan 55 desa.

Jumlah 55 BTS yang didanai oleh pemerintah dan dibangun oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti). Pembangunan menara BTS tersebut merupakan bagian dari proyek penyediaan layanan 4G di seluruh desa yang masuk kategori 3T (terdepan, terpencil, tertinggal), termasuk di Kabupaten Bombana.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan, berikut ini adalah data menara-menara BTS yang telah dibangun oleh Bakti Kementerian Komunikasi dan Informatika RI pada 20 kecamatan dan 55 desa tertinggal di Kabupaten Bombana yang akan terurai pada Tabel 2.

Tabel 2 Data BTS di Kabupaten Bombana

NO.	NAMA SITE ID	ALAMAT	KECAMATAN
1	Bakti Lampata/SLG0105	Desa Lampata	Rumbia Tengah
2	Bakti Lantowua/SLG00124	Desa Lantowua	Rarowatu Utara
3	Bakti Tinabite/SLG0050	Desa Tinabite	Lantari Jaya
4	Bakti Watu-Watu/SLG00137	Desa Watu-Watu	Lantari Jaya
5	Bakti Tontonunu/SLG0049	Desa Tontonunu	Tontonunu
6	Bakti Tongkoseng/SLG00123	Desa Tongkoseng	Tontonunu
7	Bakti Watu Melomba/SLG00109	Desa Watu Melomba	Tontonunu
8	Bakti Tetehaka/SLG00135	Desa Tetehaka	Tontonunu
9	Bakti Batu Sampe/SLG00138	Desa Batu Sampe Indah	Mataoleo
10	Bakti Liano/SLG0023	Desa Liano	Mataoleo
11	Bakti Lora/SLG0104	Desa Lora	Mataoleo
12	Bakti Mawar/SLG00119	Desa Mawar	Mataoleo
13	Bakti Pomontoro/SLG0022	Desa Pomontoro	Mataoleo
14	Bakti Laloa/SLG0026	Desa Laloa	Mataoleo
15	Bakti Tajuncu/SLG0025	Desa Tajuncu	Mataoleo
16	Bakti Hambawa/SLG0120	Desa Hambawa	Mataoleo
17	Bakti Kolombi Matausu/SLG00136	Desa Kolombi Matausu	Matausu
18	Bakti Lamuru/SLG0055	Desa Lamuru	Matausu
19	Bakti Totole/SLG0056	Desa Totole	Matausu
20	Bakti Morengke/SLG0053	Desa Morengke	Matausu
21	Bakti Wia-Wia/SLG0054	Desa Wia-Wia	Matausu
22	Bakti Pokurumba/SLG008	Desa Pokurumba	Poleang
23	Bakti Salosa/SLG009	Desa Salosa	Poleang
24	Bakti Mambo/SLG0052	Desa Mambo	Poleang Timur
25	Bakti Leboea/SLG0046	Desa Leboea	Poleang Tengah
26	Bakti Poleondro/SLG0048	Desa Poleondro	Poleang Tengah
27	Bakti Paria/SLG0047	Desa Paria	Poleang Tengah
28	Bakti Pusuea/SLG00121	Desa Pusuea	Poleang Utara
29	Bakti Lamoare/SLG0030	Desa Lamoare	Poleang Tenggara
30	Bakti Lemo/SLG00126	Desa Lemo	Poleang Tenggara
31	Bakti Rambaha/SLG0031	Desa Rambaha	Poleang Tenggara
32	Bakti Babamolingku/SLG0018	Desa Babamolingku	Poleang Barat
33	Bakti Balasari/SLG0019	Desa Balasari	Poleang Barat
34	Bakti Matabundu/SLG020	Desa Matabundu	Poleang Barat
35	Bakti Analere/SLG0021	Desa Analere	Poleang Barat
36	Bakti Bulumanai/SLG00152	Desa Bulumanai	Poleang Barat
37	Bakti Rahadopi/SLG0011	Desa Rahadopi	Kabaena
38	Bakti Tirongkotua/SLG0012	Desa Tirongkotua	Kabaena
39	Bakti Lamonggi/SLG0041	Desa Lamonggi	Kabaena Tengah
40	Bakti Tangkeno/SLG0044	Desa Tangkeno	Kabaena Tengah
41	Bakti Lengora/SLG0043	Desa Lengora	Kabaena Tengah
42	Bakti Lengora Selatan/SLG0045	Desa Lengora Selatan	Kabaena Tengah
43	Bakti Enano/SLG0042	Desa Enano	Kabaena Tengah

44	Bakti Larolanu/SLG0040	Desa Larolanu	Kabaena Utara
45	Bakti Sangia Makmur/SLG0037	Desa Sangia Makmur	Kabaena Utara
46	Bakti Wumbulasa/SLG0036	Desa Wumbulasa	Kabaena Utara
47	Bakti Eemokolo/SLG0038	Desa Eemokolo	Kabaena Utara
48	Bakti Tedubara/SLG0039	Desa Tedubara	Kabaena Utara
49	Bakti Balo/SLG0015	Desa Balo	Kabaena Timur
50	Bakti Bungi-Bungi/SLG0017	Desa Bungi-Bungi	Kabaena Timur
51	Bakti Toli-Toli/SLG0016	Desa Toli-Toli	Kabaena Timur
52	Bakti Baliara Kepulauan/SLG0035	Desa Baliara Kepulauan	Kabaena Barat
53	Bakti Puu Nunu/SLG0034	Desa Puu Nunu	Kabaena Selatan
54	Bakti Langkema/SLG00122	Desa Langkema	Kabaena Selatan
55	Bakti Batu Lamburi	Desa Batu Lamburi	Kep. Masaloka Raya

Sumber: Diolah dari data dan Dinas Kominfo Sultra (2024)

Adapun data-data terkait BTS yang tersebar di Kabupaten Bombana sesuai hasil observasi peneliti ditunjukkan pada Gambar 1 dan 2.

Gambar 1. BTS di Kec. Poleang Tengah



Sumber: Data Primer (2024)

Gambar 2. BTS di Kec. Pokurumba



Sumber: Data Primer (2024)

Penyediaan BTS pada banyak wilayah terpencil dan terisolasi memahami bahwa jarak dan waktu sudah dapat diminimalkan dengan kehadiran perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini. Kehadiran teknologi informasi juga bersifat terbuka terhadap perubahan sehingga memudahkan pekerjaan dan dapat dimanfaatkan oleh organisasi.

Selain itu penyediaan dan pembangunan BTS khususnya yang sudah sistem 4G sebagai infrastruktur konektivitas digital untuk akses digital pada banyak daerah 3T menjadi kunci akselerasi digitalisasi pada banyak sektor dasar seperti kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial sehingga diharapkan akan mampu mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah.

Hal itu juga dikuatkan oleh Dhahir (2019) yang menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia telah berupaya dalam mengurangi kesenjangan digital disebabkan hal ini merupakan penghambat *Making Indonesia 4.0*. Salah satu cara dalam mengurangi kesenjangan digital terutama daerah tertinggal, terpencil, dan terluar (3T) adalah menyediakan layanan telekomunikasi seperti BTS dan sinyal *broadband* (Hadiyat, 2014; R. R. Yusuf et al., 2018).

Strategi dalam Penyediaan BTS dengan Pendekatan *Collaborative Governance* di Kabupaten Bombana

Hasil wawancara pada salah satu informan penelitian, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tenggara, (Bapak Dr M. Ridwan Badallah, S.Pd., M.M) terungkap sebagai berikut

Kondisi infrastruktur jaringan internet di Kabupaten Bombana sudah terbantu dengan adanya bantuan pembangunan menara BTS dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (kini: Kementerian Komunikasi Digital) sebanyak 55 menara BTS (Wawancara tertanggal 20 Agustus 2024)

Hal senada dikuatkan oleh informan penelitian lainnya, Bapak Rusdamin (Kadis Kominfo Kab. Bombana) dalam wawancara sebagai berikut

Dalam menunjang akses jaringan internet masyarakat di Kabupaten Bombana, Dinas Kominfo Bombana bekerja sama dengan Bakti Kominfo dan Telkomsel. Bakti Kominfo membangun di 55 menara BTS di wilayah-wilayah terpencil. Sedangkan Telkomsel sebagai provider swasta membangun di wilayah perkotaan dan wilayah terpencil (Wawancara tertanggal 4 September 2024)

Hasil wawancara pada kedua informan penelitian diatas menegaskan komitmen pemerintah bersama-sama dengan pihak swasta untuk membangun *Base Transceiver Station (BTS)* di wilayah Kabupaten Bombana.

Penyediaan *Base Transceiver Station (BTS)* di wilayah terpencil sangat penting untuk meningkatkan akses informasi bagi masyarakat terutama di daerah yang selama ini kesulitan dalam menjangkau layanan komunikasi. Akses yang baik terhadap informasi memungkinkan masyarakat untuk memperoleh pengetahuan yang dapat meningkatkan kualitas hidup mereka, serta memfasilitasi komunikasi antar-individu dan antarsektor dalam masyarakat. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mewujudkan penyediaan BTS di wilayah terpencil adalah *collaborative governance* yang mengedepankan kerja sama antara pemerintah, sektor

swasta, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan infrastruktur.

Pendekatan ini perlu dilihat dari aspek komunikasi, karena komunikasi yang efektif antara semua pihak yang terlibat termasuk pemerintah, perusahaan telekomunikasi, dan masyarakat merupakan faktor kunci dalam keberhasilan proyek penyediaan *Base Transceiver Station* (BTS) di wilayah terpencil. Tanpa komunikasi yang baik, koordinasi antara pihak-pihak terkait dapat terhambat, mengakibatkan keterlambatan atau kesalahan dalam implementasi. Sebaliknya, komunikasi yang lancar memastikan bahwa informasi tentang kebutuhan, tantangan, serta tujuan proyek dapat dipahami dan dijalankan bersama dengan jelas. Oleh karena itu, pendekatan komunikasi yang terbuka dan terstruktur akan mempercepat penyelesaian proyek dan mengoptimalkan hasilnya.

Perlu dilakukan analisis SWOT dalam menghasilkan strategi yang tepat dalam penyediaan *Base Transceiver Station* (BTS) di Wilayah Terpencil dalam Menunjang Akses Informasi Masyarakat dengan Pendekatan *Collaborative Governance* di Kabupaten Bombana.

Untuk merumuskan strategi yang tepat, dilakukan analisis SWOT (*Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats*) yang akan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dalam penyediaan BTS di Kabupaten Bombana dengan pendekatan *collaborative governance*, serta fokus pada aspek komunikasi.

Strengths (Kekuatan):

Strengths (Kekuatan) dalam analisis SWOT merujuk pada faktor internal yang memberikan keunggulan dan posisi yang lebih baik bagi organisasi atau proyek untuk mencapai tujuannya dan memanfaatkan peluang yang ada. Kekuatan ini adalah elemen-elemen positif yang dimiliki organisasi yang dapat menjadi dasar untuk pertumbuhan, keberhasilan, dan daya saing. Kekuatan sering kali berasal dari sumber daya internal yang dimiliki.

1. Adanya Regulasi yang Jelas

Hasil wawancara pada salah satu informan penelitian Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tenggara, (Dr M. Ridwan Badallah, S.Pd., M.M) adalah sebagai berikut

Kita tidak asal membangun BTS kalau tidak ada dasar yang jelas bagi kami (Pemda). Sehingga menurut saya, regulasi yang jelas menjadi kekuatan dalam strategi pembangunan BTS tidak hanya di Kabupaten Bombana namun juga seluruh kabupaten di Provinsi Sulawesi Tenggara (Wawancara tertanggal (Wawancara tertanggal 20 Agustus 2024)

Hasil wawancara diatas itu dikuatkan dengan studi dokumentasi dimana regulasi pengaturan pembangunan BTS tercantum dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan

Informatika Nomor: 02/Per/M.Kominfo/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi.

Dalam Peraturan tersebut sangat jelas tercantum bahwa syarat pembangunan menara yang termaktub dalam Pasal 2 yaitu menara (BTS) harus digunakan secara bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi demi efisiensi dan efektivitas penggunaan ruang serta pembangunan tersebut harus mendapatkan izin dari instansi yang berwenang. Regulasi yang jelas tentu menjadi salah satu kekuatan dalam penyelenggaraan pemerintahan termasuk dalam pengaturan penyediaan BTS itu sendiri. anpa aturan yang tegas, pembangunan infrastruktur digital dapat terhambat atau bahkan terjadi tumpang tindih, yang berdampak pada efisiensi dan pemerataan akses. Regulasi yang baik juga dapat memastikan bahwa pembangunan BTS dilakukan dengan mempertimbangkan aspek teknis, sosial, dan lingkungan yang memadai. Dengan adanya regulasi yang jelas, pemerintah dapat mengkoordinasikan berbagai pihak terkait, seperti swasta, masyarakat, dan lembaga pemerintah lainnya, untuk mencapai tujuan bersama, yaitu pemerataan akses informasi dan komunikasi di seluruh wilayah.

2. Dukungan Pemerintah Pusat hingga Daerah

Dukungan pemerintah itu bisa terlihat dari regulasi yang sangat jelas dari Pemerintah Pusat hingga keinginan Pemerintah Daerah dalam memfasilitasi penyediaan lahan untuk pembangunan BTS ataupun menyusun pengaturan penempatan lokasi menara BTS sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal itu diakui oleh salah seorang informan penelitian, Rismawati Fattah, Kasubag Perencanaan Keuangan Dinas Kominfo Kabupaten Bombana yang menyatakan sebagai berikut

Dukungan Pemkab Bombana dalam hal ini adalah tanah yang kami hibahkan dalam pembangunan BTS di Kabupaten Bombana (wawancara tertanggal 4 September 2024)

Analisis dari hasil wawancara di atas menegaskan bahwa pembangunan BTS di Kabupaten Bombana melibatkan koordinasi antara pemerintah daerah dan Bakti Kominfo, yang menunjukkan bagaimana peran pemerintah sangat penting dalam memastikan akses jaringan internet dapat merata, terutama di wilayah yang tergolong *blankspot*. Hasil wawancara itu menguatkan temuan penelitian Juanda & Izzulhaq (2023) yang menyatakan bahwa dukungan pemerintah akan sangat bermanfaat dalam penyediaan dan pemerataan jaringan internet di banyak wilayah Indonesia.

Peran dan dukungan pemerintah daerah juga tergambar dalam peraturan terkait (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembangunan dan

Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi) di mana dinyatakan bahwa pembangunan menara BTS wajib mendirikan izin mendirikan bangunan menara dari bupati/wali kota kecuali untuk Provinsi DKI Jakarta.

3. Kerjasama Antarpemangku Kepentingan

Pendekatan *collaborative governance* memungkinkan adanya kerja sama yang lebih baik antara pemerintah, perusahaan telekomunikasi, masyarakat lokal, dan pihak-pihak terkait lainnya yang dapat mempercepat proses pembangunan BTS. Salah seorang informan penelitian, Ibu Juniati Azizah, Pranata Komputer Ahli Bidang Teknologi Informatika dan Komunikasi Dinas Kominfo Sultra menyatakan sebagai berikut

Pembangunan 55 BTS tersebut merupakan kolaborasi antara pemerintah melalui Kominfo dan masyarakat setempat yang secara sukarela menghibahkan tanah mereka untuk pembangunan Menara BTS. Kehadiran BTS tersebut sangat membantu masyarakat mengakses jaringan internet dibandingkan ketika belum ada BTS yang dibangun oleh Kominfo, khususnya di wilayah-wilayah terpencil termasuk di beberapa titik di Kabupaten Bombana (Wawancara tertanggal 20 Agustus 2024)

Hasil wawancara diatas menegaskan teori yang dikemukakan oleh (Dwiyanto, 2010) bahwa masing-masing pihak akan diikat oleh adanya kepentingan bersama dalam mencari solusi terhadap suatu permasalahan atau isu tertentu yang dapat mengganggu kepentingan bersama. Dalam konteks ini, kerja sama antara pemerintah, perusahaan telekomunikasi, dan masyarakat lokal menjadi salah satu kekuatan utama yang mendukung keberhasilan proyek tersebut. Kerja sama ini tidak hanya memfasilitasi penyediaan infrastruktur telekomunikasi, tetapi juga mempercepat pemerataan akses informasi yang pada gilirannya mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat di daerah yang sebelumnya terisolasi.

Peran *stakeholder* lain adalah pelibatan media dalam menyebarkan informasi terkait manfaat dari BTS dalam mendorong peningkatan akses informasi masyarakat serta mengurangi kesenjangan digital terutama pada banyak titik di Kabupaten Bombana sebagaimana temuan penelitian yang telah dilakukan oleh Mahdar (2023) dan Yusmanizar *et al.* (2024) yang meyakini begitu besarnya dampak dan peran media dalam penyebaran informasi pembangunan yang telah dan sedang dikerjakan oleh pemerintah.

4. Dampak Terhadap Peningkatan Akses Informasi

Salah satu aspek yang diyakini menjadi unsur kekuatan dalam penyediaan BTS ini adalah keyakinan akan dampak terhadap peningkatan akses informasi masyarakat. Setiap pemangku kepentingan (*stakeholder*) sangat memahami bahwa salah satu aspek kekuatan dalam hal ini adalah besarnya dampak tersedianya BTS dalam peningkatan akses informasi masyarakat yang tidak hanya berfokus pada aspek teknologi, tetapi juga pemberdayaan

masyarakat dan peningkatan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Hal itu dijelaskan oleh salah seorang informan penelitian, Ibu Juniati Azizah, Pranata Komputer Ahli Bidang Teknologi Informatika dan Komunikasi Dinas Kominfo Sultra menyatakan sebagai berikut

bagi kami, penyediaan BTS yang dilakukan Bakti Kdementierian Kominfo sangat membantu masyarakat memudahkan aktivitas mereka, khususnya yang berkaitan dengan kegiatan yang membutuhkan internet. (Wawancara tertanggal 20 Agustus 2024)

Hal senada dinyatakan oleh informan penelitian lainnya, Ibu Rismawati Fattah, Kasubag Perencanaan Keuangan Dinas Kominfo Kabupaten Bombana yang menyatakan sebagai berikut

Tentu saja dengan semakin banyaknya BTS yang terbangun, diharapkan mampu mengurangi *blankspot* di Kabupaten Bombana (wawancara tertanggal 4 September 2024)

Hasil wawancara ini menguatkan temuan penelitian Sihite (2023) yang menyatakan dengan kemajuan internet dapat mendorong peningkatan *digital tourism* dengan penyediaan informasi tentang daya tarik objek wisata, pertukaran informasi dalam mendorong pengembangan *digital tourism destination*.

Weaknesses (Kelemahan):

Weaknesses (Kelemahan) dalam analisis SWOT merujuk pada faktor internal yang dapat menghambat atau mengurangi kemampuan suatu organisasi, proyek, atau individu untuk mencapai tujuan dan memanfaatkan peluang secara efektif. Kelemahan ini sering kali berkaitan dengan kekurangan dalam sumber daya, kemampuan, proses, atau kondisi internal lainnya yang perlu diperbaiki atau diatasi untuk mencapai kesuksesan.

1. Terbatasnya Infrastruktur Dasar:

Salah satu kelemahan utama dalam penyediaan *Base Transceiver Station* (BTS) di wilayah terpencil seperti yang terjadi di Kabupaten Bombana adalah terbatasnya infrastruktur dasar yang memadai. Keterbatasan ini mencakup berbagai aspek seperti akses jalan, pasokan listrik, dan jaringan telekomunikasi yang masih sangat terbatas di beberapa daerah. Faktor-faktor ini dapat menjadi hambatan yang signifikan dalam pembangunan BTS yang efektif dan berkelanjutan. Terlebih lagi, jika dilihat dari perspektif *collaborative governance*, keterbatasan infrastruktur dasar ini dapat memperlambat kolaborasi antarpemangku kepentingan dan menambah tantangan dalam implementasi proyek. Hal itu diakui oleh Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tenggara, (Dr M. Ridwan Badallah, S.Pd., M.M) adalah sebagai berikut

Membangun BTS itu kan tidak hanya bangun BTS namun juga butuh akses infrastruktur lain seperti akses jalan dan sebagainya. Itu menjadi tantangan yang tidak mudah ketika

melakukan pembangunan BTS di daerah-daerah terpencil menurut saya (Wawancara tanggal 20 Agustus 2024)

Hasil wawancara ini juga menguatkan hasil penelitian Slamet *et al.* (2016) dan (Hasna, 2024) yang menyatakan salah satu kelemahan paling besar dalam sebuah strategi pelaksanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah adalah terbatasnya infrastruktur dasar. Dengan adanya hal ini tentu saja akan menghambat distribusi layanan publik dan memperlambat pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

2. Kompleksitas Koordinasi

Kompleksitas koordinasi dalam model *collaborative governance* menjadi salah satu tantangan utama, terutama ketika melibatkan banyak pemangku kepentingan dengan kepentingan, visi, dan tujuan yang berbeda-beda. Setiap pihak baik pemerintah, perusahaan telekomunikasi, masyarakat lokal, dan lembaga terkait lainnya—memiliki perspektif, prioritas, dan sumber daya yang berbeda. Hal itu dijelaskan oleh salah seorang informan penelitian, Ibu Juniati Azizah, Pranata Komputer Ahli Bidang Teknologi Informatika dan Komunikasi Dinas Kominfo Sultra menyatakan sebagai berikut

Pembangunan BTS itu butuh banyak koordinasi dan kolaborasi. Tentu tidak mudah menjelaskan ke masyarakat yang mungkin berada di sekitar rencana pembangunan tower BTS. (Wawancara tanggal 20 Agustus 2024)

Hal ini dapat menyebabkan kesulitan dalam mencapai kesepakatan yang harmonis mengenai arah dan kebijakan yang akan diambil. Koordinasi yang kurang efektif dapat mengarah pada penundaan dalam pengambilan keputusan, ketidakjelasan dalam tanggung jawab, dan bahkan konflik antarpihak yang terlibat. Dalam konteks penyediaan *Base Transceiver Station* (BTS) di wilayah terpencil, masalah ini dapat memperlambat proses pembangunan, meningkatkan biaya, dan mengurangi efisiensi pelaksanaan proyek.

3. Keadaan Medan Geografis yang Sulit Diakses

Keterbatasan aksesibilitas karena kondisi geografis yang sulit menjadi salah satu hambatan besar dalam penyediaan BTS di wilayah terpencil. Wilayah dengan medan yang berat dan terisolasi mempersulit proses pembangunan, pengiriman peralatan, serta pemeliharaan BTS, sehingga meningkatkan biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk memastikan infrastruktur ini berjalan dengan baik. Kabupaten Bombana memiliki medan yang berbukit, daerah pegunungan, dan wilayah terpencil yang sangat sulit dijangkau. Kondisi ini membuat pembangunan BTS membutuhkan biaya tambahan dan waktu yang lebih lama, serta menambah kompleksitas dalam pelaksanaannya. Hal itu diakui oleh Kepala Dinas

Kominfo Provinsi Sulawesi Tenggara, (Dr M. Ridwan Badallah, S.Pd., M.M) adalah sebagai berikut

Pembangunan BTS, salah satu tantangannya ya kondisi geografis yang tidak mudah dan agak menyulitkan. (Wawancara tertanggal 20 Agustus 2024)

Hasil wawancara ini juga menguatkan temuan penelitian yang dilakukan oleh Dayini (2024) yang menyatakan medan geografis yang sulit menjadi kelemahan dalam pengembangan infrastruktur digital yang dilakukan oleh pemerintah. Hambatan geografis ini juga berdampak pada keterlibatan swasta, yang cenderung enggan berinvestasi di wilayah dengan risiko tinggi dan imbal hasil rendah.

Opportunities (Peluang):

Opportunities (Peluang) dalam analisis SWOT merujuk pada faktor eksternal yang dapat memberikan keuntungan atau mendukung pencapaian tujuan organisasi, proyek, atau inisiatif. Peluang ini biasanya berasal dari lingkungan luar yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung perkembangan dan keberhasilan. Identifikasi peluang dalam analisis SWOT membantu organisasi atau individu untuk memaksimalkan potensi mereka dan mengembangkan strategi yang efektif untuk meraih kesuksesan.

1. Perkembangan Teknologi

Perkembangan teknologi komunikasi dan telekomunikasi telah membawa dampak signifikan terhadap efisiensi dan keterjangkauan dalam penyediaan *Base Transceiver Station* (BTS), terutama di wilayah terpencil. Kemajuan dalam teknologi seperti 5G, teknologi seluler yang lebih canggih, serta perangkat keras yang lebih efisien, memungkinkan penyediaan BTS dengan biaya yang lebih rendah dan kemampuan yang lebih baik. Teknologi baru ini memungkinkan penggunaan infrastruktur yang lebih ringan dan lebih mudah dipasang, mengurangi biaya operasional dan waktu pembangunan. Selain itu, kemajuan dalam teknologi energi terbarukan seperti panel surya, juga mendukung BTS untuk beroperasi di daerah yang sulit dijangkau, mengatasi masalah pasokan listrik yang terbatas. Dengan demikian, perkembangan teknologi tidak hanya mempermudah dan mempercepat implementasi BTS, tetapi juga membuatnya lebih terjangkau dan dapat diakses di wilayah yang sebelumnya tidak terjangkau. Hal itu diakui oleh salah seorang informan penelitian, Jusman, Kepala Desa Paria Kecamatan Poleang Tengah Kabupaten Bombana dalam wawancara sebagai berikut

Saat ini tidak ada yang tidak butuh BTS. Bagi kami di desa Paria, kami merasa membutuhkan jaringan internet dalam mendukung usaha dan kehidupan kami (Wawancara tertanggal 5 September 2024)

Hasil wawancara ini menguatkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Lubis (2016) dan Habibah & Irwansyah (2021) dalam penelitiannya yang menyimpulkan bahwa perkembangan teknologi akan berdampak baik dan menjadi peluang besar dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah di berbagai sektor dan berimplikasi pada banyak sektor kehidupan manusia. Teknologi, baik dalam bentuk digitalisasi, infrastruktur cerdas, maupun pemanfaatan sistem berbasis teknologi, membuka peluang baru untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kualitas pelayanan publik. Penerapan teknologi dalam sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pemerintahan mendorong percepatan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

2. Kebutuhan Masyarakat terhadap Jaringan Internet yang Semakin Meningkat

Kebutuhan masyarakat terhadap jaringan internet yang semakin meningkat merupakan salah satu peluang signifikan dalam penyediaan *Base Transceiver Station* (BTS), terutama di daerah terpencil seperti Kabupaten Bombana. Seiring dengan perkembangan teknologi digital, kebutuhan akan akses internet yang cepat dan stabil semakin meningkat, baik untuk kebutuhan pribadi, pendidikan, pekerjaan, maupun layanan publik. Hal itu diakui oleh salah seorang informan penelitian, Adnan Haris, Sekretaris Desa Pokorumba dalam wawancara sebagai berikut

Internet sekarang adalah kebutuhan dasar bagi banyak masyarakat, termasuk masyarakat di Desa kami, Desa Pokorumba (wawancara tertanggal 5 September 2024)

Hasil wawancara menguraikan kebutuhan masyarakat terhadap jaringan internet yang semakin meningkat dapat menjadi peluang dalam penyediaan BTS. Hal itu bisa terlihat dari peningkatan permintaan akan konektivitas internet yang semakin cepat dan masif, dukungan untuk ekosistem digital lokal, peningkatan infrastruktur jaringan yang merata di banyak wilayah di Kabupaten Bombana maupun dalam mendukung pertumbuhan ekonomi digital.

3. Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

Masyarakat di Kabupaten Bombana semakin banyak menyadari bahwa dengan adanya infrastruktur dasar termasuk *Base Transceiver Station* (BTS) akan bermanfaat bagi mereka baik dalam memungkinkan masyarakat hingga desa terpencil mengakses informasi lebih cepat dan luas, mendorong pemberdayaan masyarakat baik dalam kebijakan publik maupun dalam segi ekonomi serta berpengaruh pada pemahaman digital pada berbagai aspek kehidupan dasar manusia seperti aspek pendidikan, ekonomi, dan sebagainya. Hal tersebut diuraikan oleh salah seorang informan penelitian, Rismawati Fattah, Kasubag Perencanaan Keuangan Dinas Kominfo Kabupaten Bombana

Masyarakat semakin sadar bahwa dalam pembangunan BTS ini membutuhkan partisipasi dan keterlibatan mereka, Dan hal ini ditunjukkan dalam penyediaan lahan bagi pembangunan BTS dimana masyarakat yang memiliki tanah akan dibeli atau dihibahkan untuk pembangunan BTS dan hal ini menunjukkan adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah (Wawancara tertanggal 4 September 2024).

Hasil wawancara diatas memperlihatkan adanya peningkatan kesadaran terhadap kebutuhan internet yang berakibat pada pemerataan akses informasi dan peningkatan pemahaman digitalisasi yang akan berpengaruh pada aspek pendidikan, ekonomi dijelaskan oleh Anita & Astuti (2022) diyakini oleh peneliti menjadi salah satu peluang dalam penyediaan BTS di wilayah seperti Kabupaten Bombana.

4. Kemitraan dengan Sektor Swasta

Kemitraan dengan sektor swasta, terutama perusahaan telekomunikasi, dapat mempercepat investasi dan pembangunan BTS di wilayah terpencil. Perusahaan swasta membawa keahlian teknis, sumber daya finansial, dan teknologi yang diperlukan. Keahlian ini sangat dibutuhkan di wilayah terpencil yang memiliki tantangan besar dalam hal aksesibilitas, topografi yang sulit, dan keterbatasan sumber daya manusia, sementara pemerintah dapat berbagi biaya dan risiko yang dapat mengurangi beban keuangan pemerintah, terutama di daerah yang kekurangan dana untuk pembangunan infrastruktur. Selain itu, kemitraan ini membuka peluang untuk penerapan solusi efisiensi dan memperluas akses layanan komunikasi di daerah-daerah yang sebelumnya terisolasi. Hal itu dijelaskan dalam wawancara pada salah seorang informan penelitian, Rismawati Fattah, Kasubag Perencanaan Keuangan Dinas Kominfo Kabupaten Bombana sebagai berikut

Untuk pembangunan 55 titik Menara BTS di wilayah Kabupaten Bombana, kami hanya mengajukan ke Bakti Kominfo, karena tidak sembarang pemasangan titik BTS. Ada kriteria yang ditentukan antara lain bahwa di desa tersebut betul-betul adalah wilayah blankspot. Nanti pihak Bakti yang menentukan titiknya. Hal ini menurut saya butuh adanya kerjasama antara berbagai pihak dalam pembangunan BTS (Wawancara tertanggal 4 September 2024)

Hasil wawancara ini memperlihatkan bahwa dalam pembangunan BTS ini membutuhkan kemitraan berbagai pihak karena pembangunan 55 BTS tentu bukan hanya satu pihak saja terlibat. Hal ini juga mencerminkan betapa pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah dan pusat dalam merencanakan dan melaksanakan proyek-proyek infrastruktur digital yang vital, seperti BTS. Melalui mekanisme ini, pembangunannya dapat lebih terarah, meminimalkan pemborosan, serta memastikan bahwa pembangunan tidak hanya fokus pada daerah yang sudah terlayani, tetapi juga mengutamakan wilayah yang benar-benar membutuhkan akses komunikasi.

5. Masih Besarnya Area yang Tergolong *Blank Spot*

Salah satu peluang utama dalam strategi penyediaan *Base Transceiver Station* (BTS) di Kabupaten Bombana adalah masih besarnya area yang tergolong *blank spot* atau daerah yang tidak terjangkau oleh jaringan telekomunikasi yang ada. *Blank spot* ini menjadi peluang besar untuk pembangunan infrastruktur BTS yang dapat memberikan dampak signifikan pada pemerataan akses komunikasi dan informasi, serta mendukung perkembangan ekonomi dan sosial di Kabupaten Bombana. Hal ini dijelaskan oleh salah seorang informan penelitian Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tenggara, (Dr M. Ridwan Badallah, S.Pd., M.M) sebagai berikut

Blank spot masih besar di Kabupaten Bombana, dan hal itu malah menjadi potensi besar bagi pemerintah dan swasta untuk mengambil peran dalam mendorong pembangunan BTS di wilayah ini, menurut saya (Wawancara tertanggal 20 Agustus 2024)

Hasil wawancara ini memperlihatkan bahwa masih besarnya area *blank spot* di Kabupaten Bombana menunjukkan bahwa meskipun kondisi ini menjadi hambatan dalam akses informasi dan pelayanan publik, di sisi lain justru menyimpan potensi strategis bagi pemerintah dan sektor swasta untuk mengambil peran lebih aktif.

6. Besarnya Potensi Sektor Informatika dan Komunikasi terhadap Negara

Salah satu sektor yang sangat berkontribusi terhadap PDB (Produk Domestik Bruto) nasional adalah sektor informasi dan komunikasi dengan laju pertumbuhan sebesar 9.41 % per tahun. Hal ini dijelaskan oleh salah seorang informan penelitian Kepala Dinas Kominfo Provinsi Sulawesi Tenggara, (Dr M. Ridwan Badallah, S.Pd., M.M) sebagai berikut

Saya meyakini bahwa dari tahun ke tahun penerimaan negara dari sektor kominfo inisangat besar dan hal ini adalah peluang baik terutama bagi pemerintah untuk mendorong pihak swasta mengambil peran dalam pembangunan BTS di wilayah ini, (Wawancara tertanggal 20 Agustus 2024)

Hal itu juga dijelaskan oleh Saefurrohman, *et al.* (2022) yang meyakini bahwa dari tahun ke tahun kontribusi sektor informatika dan komunikasi sangat meningkat dan akan menjadi salah satu tulang punggung dalam memperoleh pendapatan negara yang sangat menjanjikan di tengah era digital seperti saat ini.

Threats (Ancaman):

Threats (Ancaman) dalam analisis SWOT merujuk pada faktor eksternal yang dapat membatasi atau merugikan kinerja organisasi, proyek, atau inisiatif. Ancaman ini berasal dari lingkungan luar yang berada di luar kendali langsung, namun dapat memengaruhi tujuan dan strategi yang dijalankan.

1. Resistensi Sosial

Resistensi sosial adalah salah satu faktor penting yang dapat menjadi tantangan dalam penyediaan *Base Transceiver Station* (BTS) di wilayah terpencil, termasuk di Kabupaten Bombana. Masyarakat setempat, terutama di daerah yang masih sangat bergantung pada tradisi dan budaya lama, mungkin mengalami kesulitan dalam menerima teknologi baru atau perubahan besar yang dibawa oleh pembangunan BTS. Beberapa informan penelitian menyatakan bahwa dengan adanya pembangunan BTS, sedikit banyak mengubah cara hidup masyarakat di Kabupaten Bombana yang cenderung tradisional tanpa bergantung dengan teknologi modern menjadi mulai terpengaruh dan bergantung dengan teknologi karena adanya pembangunan BTS yang ada di wilayah mereka. Permasalahan resistensi sosial diyakini karena kurangnya pemahaman masyarakat mengenai BTS itu sendiri, sehingga sudah menjadi kewajiban dan tanggung jawab pemerintah khususnya di tingkat Kabupaten Bombana. Hal ini diungkapkan oleh informan penelitian, Rismawati Fattah, Kasubag Perencanaan Keuangan Dinas Kominfo Kabupaten Bombana sebagai berikut

Sekalipun jarang terjadi, namun potensi untuk resistensi sosial dalam penyediaan BTS tetap harus diantisipasi menurut saya (Wawancara tertanggal 4 September 2024)

Pemerintah daerah dapat menjelaskan dan memberikan pemahaman terkait BTS dalam bentuk sosialisasi dan edukasi sehingga masyarakat juga semakin teredukasi, selain sebagai perwujudan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, sosialisasi dan edukasi juga adalah bentuk komunikasi yang dilakukan oleh instansi pemerintahan dalam bentuk pesan, program dan gagasan sehingga tugas-tugas pemerintahan dan amanat negarai dipahami oleh masyarakat (B. Yusuf & Ridwan, 2018). Sosialisasi yang dilakukan secara baik dan efektif akan mampu menurunkan tingkat kesalahpahaman masyarakat yang berujung pada resistensi dan penolakan terhadap pembangunan yang dilakukan yang cenderung mengubah pola hidup masyarakat saat ini (Fandita & Darmastuti, 2023).

2. Masalah Birokrasi dan Perizinan yang Rumit

Proses perizinan yang panjang dan birokrasi yang rumit dapat memperlambat pembangunan BTS. Hambatan administrasi dan perizinan yang kompleks sering kali menjadi salah satu kelemahan utama dalam proyek infrastruktur. Setiap pembangunan infrastruktur besar seperti BTS, memerlukan berbagai izin dari instansi pemerintah yang berbeda, baik di tingkat pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota. Dalam banyak kasus, proses perizinan ini melibatkan banyak tahap yang memakan waktu, termasuk pengajuan izin lokasi, izin

lingkungan, izin konstruksi, hingga izin operasional. Di daerah terpencil, seperti Kabupaten Bombana, kendala administratif ini menjadi lebih rumit karena keterbatasan sumber daya manusia, akses teknologi, dan kurangnya koordinasi antarlembaga pemerintah yang terlibat dalam proses perizinan. Hal ini dapat memperlambat kemajuan proyek BTS dan menyebabkan penundaan pembangunan, yang berdampak pada keterlambatan akses komunikasi bagi masyarakat setempat. Hal ini diungkapkan oleh informan penelitian, Rismawati Fattah, Kasubag Perencanaan Keuangan Dinas Kominfo Kabupaten Bombana sebagai berikut

Proses perizinan dalam penyediaan BTS ini ranah dari Kementerian Kominfo namun ada hal yang menjadi kewenangan kami terutama dari hal penyediaan lahan, dan jika tidak diantisipasi dengan baik, hal ini akan menjadi masalah (Wawancara tanggal 4 September 2024)

Hasil wawancara ini diperkuat oleh hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Syaiful, *et al.* (2024) bahwa perizinan terkadang menjadi permasalahan jika tidak dilaksanakan secara kolaborasi antarberbagai pihak sehingga membutuhkan komitmen bersama para *stakeholder* untuk terus-menerus menyampaikan metode perizinan terbaru yang terintegrasi dengan Sistem OSS-RBA (*One Single Submission–Risk Based Approach*).

3. Risiko Keamanan dan Lingkungan:

Penyediaan *Base Transceiver Station* (BTS) di wilayah terpencil seperti Kabupaten Bombana menghadapi berbagai tantangan, salah satunya adalah risiko keamanan dan lingkungan. Faktor-faktor ini menjadi ancaman yang dapat memengaruhi kelancaran dan keberhasilan pembangunan BTS serta operasional jangka panjangnya. Hal ini diungkapkan oleh informan penelitian, Rismawati Fattah, Kasubag Perencanaan Keuangan Dinas Kominfo Kabupaten Bombana sebagai berikut

Di beberapa daerah, banyak terjadi risiko keamanan dan lingkungan dalam proses pembangunan BTS. Alhamdulillah, di Kabupaten Bombana, kami belum pernah mendapati kasus seperti ini, tapi tetap saja harus menjadi catatan sebagai bahan pertimbangan (Wawancara tanggal 4 September 2024)

Dalam konteks ini, terdapat beberapa aspek yang perlu dianalisis terkait dengan risiko keamanan dan lingkungan yang dapat menghambat penyediaan BTS di wilayah terpencil. Pada gilirannya dapat berdampak pada akses informasi masyarakat seperti resiko bencana alam, ancaman keamanan fisik terhadap infrastruktur BTS itu sendiri serta dampak lingkungan yang mungkin ditimbulkan dari adanya pembangunan BTS yang tidak ditata dengan baik.

Strategi Berdasarkan Analisis SWOT:

1. Strategi S-O terdiri atas:

a. Optimalisasi Regulasi untuk Mendukung Pembangunan BTS di Beberapa Wilayah Kabupaten Bombana

Mempercepat proses perizinan dan regulasi yang mendukung penyediaan BTS dengan sistem perizinan terpadu yang mengurangi birokrasi dan hambatan administratif. Kemudahan dalam perizinan akan mempercepat waktu pembangunan dan distribusi BTS ke banyak titik di Kabupaten Bombana yang masih tergolong area *blank spot*. Temuan penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Anandhita, 2015) yang menyatakan perlunya dukungan pemerintah dalam mendorong perkembangan industri teknologi informasi dan komunikasi termasuk dalam mendukung pembangunan BTS di beberapa wilayah tanah air yang cenderung masih terisolasi. Oleh karena itu, dukungan kebijakan, insentif fiskal, serta kemitraan strategis antara pemerintah dan swasta sangat diperlukan untuk mewujudkan pemerataan akses TIK di seluruh penjuru Indonesia.

b. Pemanfaatan Teknologi Terkini dalam Pembangunan BTS

Menggunakan teknologi terbaru seperti 5G dan *Internet of Things* (IoT), dalam pembangunan BTS untuk memastikan jaringan yang lebih cepat, efisien, dan mampu mendukung kebutuhan masyarakat yang semakin berkembang dalam era digital. Temuan penelitian ini. Teknologi 5G memungkinkan transfer data berkecepatan tinggi dengan latensi rendah, sangat mendukung layanan digital seperti telemedicine, e-learning, dan smart city. Sementara IoT memperluas konektivitas antar perangkat, yang dibutuhkan dalam berbagai sektor, mulai dari pertanian hingga transportasi. Dengan mengadopsi teknologi ini, pemerintah tidak hanya memperluas jangkauan jaringan, tetapi juga mendorong transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan, sesuai arah pembangunan nasional berbasis teknologi.

2. Strategi S-T terdiri atas:

a. Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

Perlunya peningkatan upaya untuk sosialisasi dan edukasi masyarakat dengan pendekatan budaya serta kearifan lokal yang dianut sehingga masyarakat lebih terbuka terhadap perubahan. Hal ini juga dilakukan dengan kolaborasi pihak lain seperti tokoh-tokoh masyarakat yang didengar oleh masyarakat sebagai bagian dari mekanisme *collaborative governance*. Hal tersebut menguatkan temuan penelitian dari (Satyadharma & Susanti, 2024) bahwa pembangunan yang cenderung berhasil jika melibatkan peran masyarakat dan hal itu membutuhkan adanya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Sosialisasi dan Edukasi

juga membantu meningkatkan literasi digital, yang menjadi fondasi penting dalam era transformasi digital. Dengan demikian, pendekatan partisipatif melalui komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci sukses pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif.

b. Mengintegrasikan Aspek Keamanan dan Perlindungan Lingkungan dalam Pembangunan BTS

Strategi ini menjadi langkah penting dalam menjamin keberlanjutan operasional BTS, khususnya di wilayah yang memiliki potensi gangguan sosial. Dengan membangun infrastruktur yang tidak hanya kuat secara teknis tetapi juga aman dan ramah lingkungan, kehadiran BTS dapat diterima dengan lebih baik oleh masyarakat. Keterlibatan aparat keamanan lokal dan masyarakat sekitar dalam menjaga fasilitas ini menciptakan rasa tanggung jawab bersama serta memperkuat jalinan sosial antara pemerintah, penyedia layanan, dan warga. Pendekatan ini tidak hanya meminimalkan risiko kerusakan atau sabotase, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya infrastruktur digital dalam mendukung kehidupan sehari-hari. Hal tersebut juga dapat dilakukan dengan kolaborasi dan pendekatan dengan masyarakat, sebagaimana temuan penelitian dari (Satyadharma & Susanti, 2024) bahwa masyarakat yang dilibatkan dalam suatu proses pembangunan oleh pemerintah akan menjadi pihak penting dalam mendorong keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan, termasuk dalam konteks menjaga keamanan lingkungan dan sosial dalam proses pembangunan BTS di wilayah tersebut.

3. Strategi W-O terdiri atas:

a. Prioritas Pembangunan BTS di Area *Blank Spot*

Perlunya prioritas pembangunan BTS di area *blank spot* yang lebih membutuhkan akses internet. Pemetaan *blank spot* yang akurat akan memastikan bahwa investasi dilakukan di daerah yang paling membutuhkan konektivitas, sehingga dapat memberikan dampak yang maksimal pada masyarakat yang terisolasi. Temuan penelitian ini sejalan dengan kondisi yang diungkapkan oleh (Hadiyat, 2014) bahwa kondisi infrastruktur TIK di Kabupaten Wakatobi masih lemah karena masih banyaknya daerah yang belum tersentuh dengan jaringan telekomunikasi sehingga membutuhkan adanya pembangunan infrastruktur TIK dalam mendorong peningkatan infrastruktur tersebut.

b. Pembangunan Infrastruktur yang Mengakomodasi Medan Geografis

Kondisi daerah yang sulit untuk diakses seharusnya bisa dicarikan solusi dalam pembangunan BTS yang fleksibel dan adaptif terhadap medan geografis yang sulit serta

penerapan teknologi seperti *mesh network* yang dapat menghubungkan beberapa titik BTS untuk memperluas cakupan di daerah terpencil, bahkan tanpa infrastruktur fisik yang memadai. Temuan penelitian ini sejalan dengan kondisi yang diungkapkan oleh (Hadiyat, 2014) bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi kesenjangan infrastruktur telekomunikasi di Kabupaten Wakatobi adalah kondisi geografis yang menyebabkan infrastruktur TIK menjadi sangat sulit dan mahal, dan salah satu hal yang dapat dilakukan adalah melakukan pembangunan infrastruktur TIK yang menyesuaikan dengan kesulitan medan geografis yang ada.

4. Strategi W-T terdiri atas:

a. Pendekatan Berbasis Masyarakat dan Kolaborasi untuk Mengurangi Resistensi Sosial

Perlunya pendekatan berbasis masyarakat dan mendorong kolaborasi berbagai pihak dalam mengurangi resistensi sosial pada masyarakat yang belum terbiasa dengan adanya perubahan hidup karena kemajuan teknologi termasuk dengan banyaknya BTS yang ada di wilayah mereka. Strategi ini sejalan dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh Wanna (Yasintha, 2020) bahwa dalam pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah perlu melakukan kolaborasi dan kerjasama serta mendorong peningkatan partisipasi masyarakat sehingga mampu mengurangi resistensi sosial dari masyarakat.

b. Optimalisasi Infrastruktur dalam Peningkatan Akses dan Mengurangi Kendala Geografis

Perlunya optimalisasi infrastruktur yang ada dengan penggunaan teknologi maju untuk mengatasi medan geografis yang sulit seperti penyediaan *BTS Modular* dan *BTS Portable* yang lebih mudah dipasang dan dipindahkan ke wilayah yang sulit diakses dan pengurangan biaya operasional. Temuan penelitian ini sejalan dengan temuan penelitian yang telah dilakukan oleh Sihite (2023) yang menyatakan perlunya dilakukan pembenahan infrastruktur pendukung berbasis telekomunikasi dan informasi sehingga dapat mendorong pembangunan yang dilaksanakan termasuk pembangunan bidang pariwisata dan mengatasi kendala terkait medan geografis yang ada.

4. Penutup

Penyediaan BTS di wilayah terpencil di Kabupaten Bombana membutuhkan pendekatan yang terkoordinasi dan melibatkan semua pemangku kepentingan dengan pendekatan *collaborative governance*. Dengan mempertimbangkan aspek komunikasi yang baik antarpihak terkait, serta strategi yang memperhatikan analisis SWOT, proyek ini dapat

berjalan lebih efektif dan menghasilkan manfaat yang maksimal bagi masyarakat. Beberapa strategi yang perlu dipertimbangkan dalam penyediaan *Base Transceiver Station* (BTS) dalam menunjang akses informasi masyarakat dengan pendekatan *collaborative governance* di Kabupaten Bombana terdiri atas optimalisasi regulasi untuk mendukung pembangunan BTS di beberapa wilayah Kabupaten Bombana, pemanfaatan teknologi terkini dalam pembangunan BTS, peningkatan sosialisasi dan edukasi masyarakat, mengintegrasikan aspek keamanan dan perlindungan lingkungan dalam pembangunan BTS, prioritas pembangunan BTS di area *blank spot*, pembangunan infrastruktur yang mengakomodasi medan geografi, pendekatan berbasis masyarakat dan kolaborasi untuk mengurangi resistensi sosial dan optimalisasi infrastruktur dalam peningkatan akses dan mengurangi kendala geografis.

Penghargaan

Penulis berterima kasih kepada Kemendikbud-Ristek melalui Ditjen-Diktiristek dengan pendanaan sehingga penelitian ini terlaksana. Selain itu kami juga mengucapkan terima kasih kepada segala informan yang telah memberikan data dan informasi yang dibutuhkan.

Referensi

- Amsyal. (2024). *Analisis Pengembangan Prasarana Airside Bandar Udara Betoambari Kota Baubau*. Universitas Halu Oleo.
- Anandhita, V. H. (2015). Analisis Ekosistem TIK Indonesia yang Mendorong Perkembangan Industri Lokal dan Ekonomi Kreatif. *Jurnal Penelitian Pos Dan Informatika*, 5(1), 49–64. <https://doi.org/10.17933/jppi.2015.0501004>
- Anita, A., & Astuti, S. I. (2022). Digitalisasi Dan Ketimpangan Pendidikan: Studi Kasus Terhadap Guru Sekolah Dasar Di Kecamatan Baraka. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 7(1), 1–12. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v7i1.2509>
- Ansell, C., & Gash, A. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Basri, F. (2002). *Perekonomian Indonesia : Tantangan dan Harapan bagi Kebangkitan Ekonomi Indonesia*. Erlangga.
- Dayini, A. (2024). Ekonomi Analisis SWOT Infrastruktur Digital Publik (IDP) dalam Meningkatkan Inklusi Keuangan di Indonesia. *SAUJANA : Jurnal Perbankan Syariah Dan Ekonomi Syariah*, 6(01), 60–72. <https://doi.org/10.59636/saujana.v6i1.137>
- Dhahir, D. F. (2019). Rancangan Strategi Kementerian Kominfo Republik Indonesia dalam Upaya Mengurangi Kesenjangan Digital. *Jurnal PIKOM (Penelitian Komunikasi Dan Pembangunan)*, 20(2).
- Dwiyanto, A. (2010). *Manajemen Pelayan Publik, Peduli, Inklusif dan Kolaboratif*. Gadjah Mada University Press.
- Fandita, A. L., & Darmastuti, R. (2023). Strategi Komunikasi Dinas Komunikasi dan

- Informatika Kota Salatiga dalam Mensosialisasikan Program “Matur Mas Yuli.” *Jurnal Komunikasi Universitas Garut: Hasil Pemikiran Dan Penelitian*, 9(2), 161–178.
- Habibah, A. F., & Irwansyah, I. (2021). Era Masyarakat Informasi sebagai Dampak Media Baru. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 3(2), 350–363. <https://doi.org/10.47233/jteksis.v3i2.255>
- Hadiyat, Y. D. (2014). Kesenjangan Digital di Indonesia (Studi Kasus di Kabupaten Wakatobi). *Pekommas*, 17(2), 81–90.
- Hasna, M. (2024). Digitalisasi Pengelolaan Sekolah Dasar Negeri Kota Banjarmasin: Tinjauan Analisis SWOT Dalam Strategi Pengembangan Sekolah Digital. *Jurnal Pendidikan Moder*, 10(1), 32–42.
- Juanda, & Izzulhaq, A. (2023). Strategi Diskominfo dalam Pemerataan Jaringan Internet di Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Terapan Pemerintahan Minangkabau*, 3(2), 176–196. <https://doi.org/10.33701/jtpm.v3i2.3567>
- Lee, K. B. (2018). *Pembangunan Akses Informasi Masyarakat Perbatasan Melalui Penyediaan Jaringan Telekomunikasi Dan Informatika (Studi di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik)*. Universitas Brawijaya.
- Lubis, M. (2016). Peluang Pemanfaatan Pembelajaran Berorientasi Teknologi Informasi di Lingkup Madrasah (Mempersiapkan Madrasah Berwawasan Global). *Tadris: Jurnal Keguruan Dan Ilmu Tarbiyah*, 1(2), 147–153. <https://doi.org/10.24042/tadris.v1i2.1063>
- Mahdar. (2023). Peran Media Massa Lokal dalam Penanganan Stunting di Sulawesi Tenggara. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Media Sosial (JKOMDIS)*, 3(1), 273–277.
- Munawaroh, A. (2018). Strategi Diskominfo Kabupaten Inhu dalam Pelaksanaan Program Lapor. *Jom Fisip*, 5(2), 1–15.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi.
- Riyadi, & Bratakusumah. (2005). *Peran Masyarakat dalam Pembangunan*. Multigrafika.
- Saefurrohman, A., Hubeis, M., & Mulyati, H. (2022). Strategi Peningkatan Mutu Layanan Kolaborasi Jaringan Transport Telekomunikasi di Indonesia. *Jurnal Manajemen*, 13(1), 117–132. <https://doi.org/10.32832/jm-uika.v13i1.5418>
- Satyadharma, M., & Susanti, N. (2024). Collaborative Governance dalam Penyelenggaraan Transportasi Sektor Darat di Provinsi Sulawesi Tenggara. *LITERAKOM: Jurnal Literasi Dan Komunikasi*, 2(1), 1–14. <https://doi.org/10.24036/lk.v2i1.14>
- Sihite, H. Y. (2023). Pengembangan Desa Wisata Dengan Pendekatan Digital Tourism Pada Desa Wisata Kampung Terih Kec. Nongsa Batam. *Jurnal Bisnis & Teknologi Politeknik NSC Surabaya*, 10(1), 17–22.
- Sinaga, R. M. (2021). *Collaborative Governance dalam Pengelolaan Transportasi Umum di Kota Pekanbaru*. <https://repository.uir.ac.id/17345/1/177310795.pdf>
- Slamet, R., Nainggolan, B., Roessobiyatno, R., Ramdani, H., Hendriyanto, A., & Ilma, L. L. (2016). Strategi Pengembangan Ukm Digital Dalam Menghadapi Era Pasar Bebas. *Jurnal Manajemen Indonesia*, 16(2), 136–147. <https://doi.org/10.25124/jmi.v16i2.319>
- Subiakto, H. (2013). Internet untuk Pedesaan dan Pemanfaatannya Bagi Masyarakat. *Jurnal Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 26(4), 243–256.

- Sugeng. (2020). *Hukum Telematika Indonesia*. Prenada Media.
- Syaiful, Susanti, N., Satyadharma, M., Nuhun, R. S., Soeparyanto, T. S., Arsyad, L. O. M. N., Rachman, R. M., & Hado. (2024). Sosialisasi dan Edukasi Tentang Perizinan dan Pendirian Badan Hukum Bagi Para Pengusaha dan Pengemudi Angkutan Umum. *Jurnal Surya Abdimas*, 8(2), 275–283. <https://doi.org/https://doi.org/10.37729/abdimas.v8i2.4347>
- Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi.
- Utomo, B. T. (2019). Pengaruh Pembangunan Infrastruktur Terhadap Peningkatan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Sinjai. *Urban and Regional Studies Journal*, 1(2), 50–57. <https://doi.org/10.35965/ursj.v1i2.1081>
- Yasintha, P. N. (2020). Collaborative Governance Dalam Kebijakan Pembangunan Pariwisata di Kabupaten Gianyar. *Jurnal Ilmiah Dinamika Sosial*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.38043/jids.v4i1.2219>
- Yusmanizar, Mahdar, M., Syahrudin, S., Sarlan Menungsa, A., & Alim, N. (2024). *Examining the Media Coverage of the 2024 Indonesian Presidential Election on Tempo . co ' s Online Platforms*. 17(May), 63–82. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/index.php/al-munzir/article/view/63>
- Yusuf, B., & Ridwan, H. (2018). Manajemen Komunikasi Dalam Pengelolaan Informasi Pembangunan Daerah. *Jurnal Komunikasi Hasil Pemikiran Dan Penelitian*, 4(1), 50–64.
- Yusuf, R. R., Usman, U. K., & Rohmah, Y. S. (2018). Analisa Perencanaan Perluasan Coverage Area LTE Di Kabupaten Garut. *Telkom University Open Library (Ed.) e- Proceeding of Engineering*, 124–131.